



# TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

## WILAYAH SUNGAI BANGKA

### BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII

Jl. SoekarnoHatta No. 869 Kec.Alang-AlangLebar Palembang

Telp/Fax :0711-414016, email: [op1.bbws8@gmail.com](mailto:op1.bbws8@gmail.com)

---

#### REKOMENDASI

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA)

WILAYAH SUNGAI BANGKA (WS BANGKA)

#### TENTANG

RAPAT KOMISI DAN SIDANG PLENO KE-2 TKPSDA WS BANGKA TAHUN 2018

Nomor : um.02.06-Ah/201.2

Pada hari Rabu tanggal Satu Bulan Agustustahun Dua Ribu Delapan Belas (01-08-2018), bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Santika Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan Sidang Pleno Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bangka Tahun 2018 yang dilaksanakan dengan agenda : Pembahasan Isu-isu Strategis tentang Restorasi Sungai “Tantangan dan Solusi Pembangunan Berkelanjutan” diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibahas adalah AspekKonservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan Pengendalian Daya Rusak Air di Wilayah Sungai Bangka. Adapun hasil pembahasan untuk Rapat Komisi dan Sidang Pleno ke-2 TKPSDA WS Bangka yaitu :

A. KOMISI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

No.	ISU	PERMASALAHAN	UPAYAPEMECAHAN MASALAH/STRATEGI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN ANGGARAN						KET
					I 2018	II 2019	III 2021	IV 2022	V 2023	VI 2024	
1	Sumber Air	a. Perambahan kawasan hutan daerah hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghijauan daerah sumber air</li> <li>- Penegakan Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kehutanan</li> <li>- Tahura</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota/Provinsi</li> <li>- BKSDA</li> <li>- POL PP Kabupaten/Kota/Provinsi</li> <li>- BPDAS/BRC</li> </ul>							
2	Sungai Batu Rusa	a. Daya dukung dan daya tampung yang makin menurun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengecekan kualitas air sungai sebagai data control kualitas air</li> <li>- Penegakan peraturan yang berlaku (PP No. 82 Tahun 2001)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota/Provinsi</li> </ul>							
		b. Penurunan kualitas air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Pengendalian pencemaran air (PPA) terhadap izin usaha / kegiatan di sepanjang aliran sungai</li> <li>- Penegakan peraturan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota/Provinsi</li> </ul>							
3	Kelembagaan Irigasi	Belum Terbentuknya Komisi Irigasi Belum adanya Sekretariat TKPSDA WS Bangka yang permanen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera dibentuknya Komisi Irigasi untuk Mengatur Pola Tanam</li> <li>- Segera mendirikan Sekretariat TKPSDA WS Bangka yang permanen beserta Sekretaris Eksekutif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PUPR Provinsi</li> <li>- Kementerian PUPR (Balai Sumatera VIII)</li> </ul>							
4	Kondisi Infrastruktur	Masih Banyak Infrastruktur yang harus ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu Dukungan Anggaran Terhadap Daerah dalam Meningkatkan Infrastruktur Sumberdaya Air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov/Kab/Kota</li> </ul>							
5	Alokasi Air	Perlu Suatu Kajian Tentang Alokasi Air di WS Bangka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Suatu Kajian Rencana Alokasi Air di WS Bangka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian PUPR</li> </ul>							
6	Sosial	Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov/Kab/Kota</li> </ul>							
7	Evaluasi	Perlu Evaluasi Terhadap Kegiatan Sumberdaya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengevaluasi Kegiatan Kegiatan Sumberdaya Air yang telah dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov/Kab/Kota</li> </ul>							

Ketua Komisi Konservasi Sumber Daya Air



Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

B. KOMISI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

No.	ISU	PERMASALAHAN	UPAYAPEMECAHAN MASALAH/STRATEGI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN ANGGARAN						KET
					I 2018	II 2019	III 2021	IV 2022	V 2023	VI 2024	
1	Sumber Air	a. Pendangkalan sepanjang kolong disekitar wilayah pasar ikan Kota Pangkalpinang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedimentasi dan pencemaran limbah rumah tangga</li> <li>- Pengerukan sepanjang tahun kurang optimal</li> <li>- Ahli fungsi sungai menjadi pemukiman penduduk</li> <li>- Perlu adanya pengerukan dari hulu/hilir</li> <li>- Perlu adanya upaya penataan pemerintah</li> </ul>	-Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov/Kota							
		b. Banjir di pusat Kota Pangkalpinang ketika hujan turun intensitas sedang maupun lebat tetap banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus cepat dan tanggap menaggulangi banjir di pusat kota</li> <li>- Membersihkan selokan/saluran seminggu sekali bergotong royong bersih-bersih di pinggir jalan</li> <li>- Membuat komunitas Peduli Lingkungan</li> <li>- Dimulai dari diri sendiri atau mengajak keluarga untuk hidup sehat dan bersih untuk membuang sampah pada tempatnya</li> </ul>	-Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov/Kota							
2	Sungai	a. Sedimentasi, Erosi pada aliran hulu DAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penertiban tambang liar disekitar</li> <li>- Reklamasi bekas tambang setempat</li> <li>- Pembangunan kolong bekas tambang</li> <li>- Pembinaan pelatihan/sosialisasi kepada masyarakat/kelembagaan</li> <li>- Pengkaderan SDA yang berkualitas</li> <li>- Pengerukan disekitar aliran DAS</li> <li>- Pengerukan pada tepi/sisi DAS untuk mengendalikan sedimen</li> </ul>	-Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov/Kab/Kota							
		b. Penambangan liar yang masih aktif									
3	Kelembagaan irigasi	a. Belum ada Kelembagaan Petani (P3A)	-SegeradibentuknyaKelembagaanPetani (P3A)	-Dinas PUPR Prov/Kab/Kota							
4	Kondisi insfrastruktur	- Pemanfaatan kolong dibelakang perumahan CITRA LAND untuk sumber air baku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelaan kolong bekas tambang</li> <li>- Menghindari terjadinya pencemaran</li> <li>- Pembuatan instalasi air</li> </ul>	-Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov/Kota							
5	Alokasi Air	-Perludibuatnya Master Plan PengelolaanSumberdaya Air	-MembuatMaster Plan PengelolaanSumberdaya Air	-Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov/Kota							
6	Sosial	-MasihKurangnyaKesadaranMasyarakat	-MelaksanakanPemberdayaanMasyarakat	-Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov/Kota							
7	Evaluasi	-PerluEvaluasiTerhadapKegiatanSumberdaya Air	-Mengevaluasi Kegiatan Kegiatan Sumberdaya Air yang telah dilaksanakan baik oleh Pemerintah	-Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov/Kota							

Ketua Komisi Pendayagunaan Sumber Daya Air



Kepala BBWS Sumatera VIII



C. KOMISI PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

No.	ISU	PERMASALAHAN	UPAYAPEMECAHAN MASALAH/STRATEGI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN ANGGARAN						KET
					I 2018	II 2019	III 2021	IV 2022	V 2023	VI 2024	
1	Sumber Air	a. Penurunan kualitas dan kuantitas	1. Pencegahan Edukasi / Sosialisasi / Penegakan hukum terhadap kegiatan yang merubah alur sungai, memanfaatkan sempadan, memberikan dampak negatif pada daerah konservasi di laut	Dinas LH, Dinas PUPR Prov/Kab/Kota, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov/Kab, Dinas ESDM Prov, BPDAS, Dinas Kehutanan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, POL PP, Dinas							
2	Sungai Selan	a. Penurunan kualitas dan kuantitas	2. Pemulihan Pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan 33 km sepanjang sungai (Sungai Selan) dengan penanaman tanaman jelutung dan pulai bersama Asosiasi Aparatur Desa	idem							
3	Kelembagaan Irigasi	a. Belum adanya kelembagaan Irigasi (P3A)		idem							
4	Kondisi infrastruktur	a. Belum tersedia/kondisi minim pemeliharaan/belum optimal pemanfaatannya		idem							
5	Alokasi Air	a. Terbatas/Perlu digali potensi lainnya	3. Menyiapkan dokumen lingkungan untuk pembangunan rencana yang ada dalam pengendalian daya rusak air	idem							
6	Sosial	a. Belum optimal peran serta aktif semua pihak		idem							
7	Evaluasi	Perlunya sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air	4. Melaksanakan pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan bangunan-bangunan yang ada pada pengendalian daya rusak air  5. Menyusun sosialisasi kegiatan infrastruktur pengendalian banjir di kawasan rawan banjir  6. Penyusunan peta kerusakan DAS  7. Penyusunan kegiatan / penerapan piranti lunak (Sistem Informasi) yang berguna untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian  8. Mendorong pemberdayaan masyarakat agar terbentuknya komunitas Peduli Sungai di setiap sempadan sungai yang ada di WS Bangka  9. Usulan evaluasi/moratorium sawit; penyediaan sarpras utk sekretariat TKPSDA BABEL; publikasi media cetak lokal keg/renc/program/ulasankasus (misal : regulasi izin pemindahan sungai utk keg pertambangan)	idem							

Ketua Komisi Pengendalian Daya Rusak Air



Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung  
(Selaku Ketua TKPSDA WS Bangka)



Kepala Dinas PUPR Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung  
(Selaku Ketua Harian TKPSDA WS Bangka)



Kepala Bidang O & P BBWS Sumatera VIII  
(Selaku Kepala Sekretariat TKPSDA WS  
Bangka)

Medya Ramdhan, ST  
NIP. 19691122 199703 1 006

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII

Ir. Suparji, S.ST., MT  
NIP. 19621231 199803 1 030

Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung  
(Selaku Ketua TKPSDA WS Bangka)



**H. Fery Inani**  
NIP. 19700620 199903 1 009

Kepala Dinas PUPR Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung  
(Selaku Ketua Harian TKPSDA WS Bangka)



**Ir. Noviar Ishak**  
NIP. 19601124 199003 1 004

Kepala Bidang O & P BBWS Sumatera VIII  
(Selaku Kepala Sekretariat TKPSDA WS  
Bangka)

**Medya Ramdhan, ST**  
NIP. 19691122 199703 1 006

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII

A blue ink signature is written over a circular official stamp that is mostly obscured.

**Ir. Suparji, S.ST., MT**  
NIP. 19621231 199803 1 030